

PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Oleh : Asri Zatira Rayes
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang
email: yaya.zatira23@gmail.com

Abstrak

Pernikahan adalah hubungan yang sangat kuat dan sakral untuk menyatukan pria dan wanita dalam bentuk keluarga atau rumah tangga. Untuk membangun keluarga, tidak hanya komitmen yang dibutuhkan, kepercayaan agama juga penting. Dalam praktiknya, pasangan yang berbeda agama mengatur untuk menikah sementara mereka masih menjalankan agama mereka sendiri. Fenomena pernikahan antar agama yang terjadi di Indonesia sebenarnya dapat menghasilkan banyak masalah hukum, seperti validitas pernikahan antara dua pengikut agama yang berbeda berdasarkan UU Perkawinan Indonesia baik yang dilaksanakan di luar negeri atau di Indonesia karena pernikahan antar agama di Indonesia tidak diatur dalam UU No. Hukum saat ini. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang pernikahan disebutkan bahwa tidak ada pernikahan di luar hukum agama dan kepercayaan setiap orang sesuai dengan UUD 1945. Dan pendaftaran pernikahan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi.

Kata kunci: konstitusi, pernikahan, hukum, perbedaan agama

Abstract

Marriage is a very strong and sacred relationship to unite a man and a woman in the form of family or household. To build a family, not only is the commitment needed, religious beliefs are also important. In practice, couples who have different religions arrange to get marriage while they are still performing their own religions. The phenomenon of inter-religious marriages occurring in Indonesia could actually generate many legal problems, such as the validity of marriage between two different religious followers based on Indonesian Marriage Law either executed overseas or in Indonesia since inter-religious marriages in Indonesia are not regulated in the current Law. In Article 2 paragraph (1) of Law Number 1/1974 concerning marriage it is stated that there is no marriage outside the law of everyone's religion and belief in accordance with the 1945 Constitution. And marriage registration is only to fulfill administrative needs.

Keywords: constitution, marriage, law, different religions

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan tidak hanya mengenai pribadi kedua calon suami istri, akan tetapi juga mengenai kepentingan keluarga dan masyarakat sekitar. Umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan sakral. Oleh karena itu, setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dan kaidah-kaidah agama. Dalam suatu perkawinan diperlukan norma hukum dan aturan-aturan yang mengaturnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 tentang HAM yaitu memberikan hak kepada setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Di Indonesia, sejak tanggal 2 Januari 1974 mengenai perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memberikan definisi perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Meskipun perkawinan memiliki aturan tersendiri dalam bentuk Undang-Undang No 1 Tahun 1974, bukan berarti UU tersebut telah mengatur secara keseluruhan mengenai perkawinan. Karena, perkawinan tidak hanya menyangkut mengenai urusan pribadi dari pasangan tetapi juga mengenai urusan sosial, hukum dan agama. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar rakyat Indonesia memiliki beragam budaya, suku, bangsa dan agama. Dengan perbedaan-perbedaan yang ada akan menimbulkan permasalahan pada rakyat Indonesia, salah satunya terdapat pada hubungan umat beragama. Seperti persoalan perkawinan yang dilakukan antar agama yang biasa disebut sebagai perkawinan beda agama.

Dapat dilihat bahwa setiap agama memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan, sehingga setiap individu harus patuh dan tunduk pada agamanya. Setiap Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing. Karena perkawinan yang didasari ikatan lahir bathin dapat dikatakan sah, apabila telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dapat disimpulkan, bahwa perkawinan wajib dilakukan menurut hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, kalau tidak, maka Perkawinan itu tidak sah.²

Perkawinan yang sah harus dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku hal ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, menentukan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku”. Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.³ Dengan melihat fakta yang ada bahwa pasangan yang berbeda agama melangsungkan perkawinan dan masih berpegang teguh pada agamanya masing-masing, maka akan menimbulkan permasalahan dalam pencatatannya, dikarenakan belum ada peraturan mengenai perkawinan beda agama yang akan menimbulkan ketidakjelasan prosedur dalam melangsungkan perkawinan beda agama tersebut.

Salah satu persoalan perkawinan beda agama adalah tidak dapat diterima baik dari KUA maupun dari Kantor Catatan Sipil. Kondisi tersebut telah dialami oleh beberapa pasangan yang memiliki perbedaan agama. Selain itu, telah dikemukakan oleh Neng Djubaidah, bagi orang Islam di Indonesia dilarang melakukan perkawinan beda agama karena kemudaratanya lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang dapat diraih. Dan proses pemurtadan sering terjadi dalam perkawinan beda agama dengan dalih Hak Asasi Manusia.⁴ Untuk mengatasi masalah perkawinan beda agama yang berdampak negatif, MUI

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Wantjik K Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hal 16

³ *Ibid*, hal. 17.

⁴ Neng Djubaidah. *Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 178

mengeluarkan Fatwa pada tanggal 1 Juni 1980 dan tanggal 28 Juli 2005.⁵ Berdasarkan Fatwa MUI Tahun 1980, maka KHI dalam pasal 40 huruf c dan pasal 44, yang dirumuskan kembali dalam pasal 33 huruf c dan pasal 36 RUU-HM-PA-BPerkwn tahun 2007 menentukan larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda.

Bukan hanya agama Islam yang melarang keras melaksanakan perkawinan beda agama tetapi seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan beda agama tersebut. Dan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan tersebut beberapa pasangan yang berbeda agama melakukan perkawinan di luar negeri seperti, di Singapura maupun di Australia. Sebelumnya sudah banyak wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Seperti, Nuruf Arifin yang kawin dengan mayong (Khatolik), Yuni Shara yang menikah dengan Hendry Siahaan (Kristen) dan masih banyak lagi.

Masyarakat umum memiliki pandangan bahwa perkawinan beda agama menjadi sah apabila dilakukan di luar negeri tetapi ada juga masyarakat yang tidak sepakat dengan pandangan tersebut karena tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada.⁶ Dengan terjadinya dinamika sosial tersebut, disertai adanya pertanyaan masyarakat tentang kebolehan dan keabsahannya, maka diadakan penelitian lebih lanjut untuk dikaji secara mendalam bagaimanakah ketentuan hukum perkawinan nasional mengatur mengenai perkawinan beda agama, dan apakah perkawinan yang dilaksanakan tersebut dapat dikatakan sah atau tidak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan yang ada. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan perbandingan atau biasa disebut pendekatan komparatif yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus tersebut dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain dan pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi.⁷

Penelitian yang bersifat studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari: Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terutama memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti buku, majalah, peraturan pemerintah, jurnal, karya ilmiah maupun artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan objek. Bahan hukum tersier yaitu sebuah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa antara lain Kamus, Ensiklopedia dan sebagainya.

⁵ Asroun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan keluarga*, cet. 2, (Jakarta : el SAS, 2008), hlm. 35

⁶ Anita Kamilah. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang dilaksanakan di luar negeri," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2018, hal 118

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 93-95

Pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan. Selain itu juga mengakses situs-situs internet, yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Setelah semua bahan hukum berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum. Dalam melakukan analisis ini penelitian menggunakan cara deskriptif analisis, yakni mengadakan analisa dengan mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan yang ada terkait dengan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri

PEMBAHASAN

Kedudukan Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah memberikan suatu ketentuan yang bersifat Nasional. Dalam kaitannya menyaring berbagai persepsi yang selama ini berkembang dalam membuat pengertian perkawinan yang timbul dari pliralisme dalam masyarakat Indonesia yang berkaitan dalam masalah hukum keluarga, khususnya dalam hukum perkawinan.

Undang-Undang perkawinan, yang memuat mengenai saknya perkawinan secara materil dala Pasal 2 ayat (1) dan secara formil dalam Pasal 2 ayat (2), maka secara nasional mengenai sahnya perkawinan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁸ Diberlakukan Undang-Undang yang bersifat nasional ini, secara perlahan telah berpengaruh dalam hal proses perkawinan. Serta membatasi berlakunya ketentuan hukum adat yang menyangkut perkawinan, apabila ada yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Agama dan ketentuan Perundang-undangan dalam bidang Hukum Agama. Oleh karena itu, hukum adat yang biasanya berpengaruh dalam pelaksanaan proses perkawinan, semakin banyak ditinggalkan. Kesulitan dalam pelaksanaan menurut adat, serta besarnya pengaruh Hukum Agama, baik Islam, Nasrani (Katolik maupun Protestan), ataupun Hindu dan Budha, yang kemudian diserap oleh Undang-Undang perkawinan memperbesar pergeseran pelaksanaan proses perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan

Suatu perkawinan yang sah, selain memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), maka harus pula memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik materil maupun formil, yang oleh Undang-Undang. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah terdiri dari:

a. Syarat Materil (Menurut Undang-Undang Perkawinan)

1. Perkawinan harus dengan persetujuan kedua mempelai (Pasal 6 ayat (1) guna menghindari terjadinya pemaksaan perkawinan
2. Bagi seorang telah diizinkan melakukan perkawinan pada usia 19 tahun sedangkan wanita 16 tahun (Pasal 17 ayat (1)), kecuali jika terdapat penyimpangan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk (Pasal 7 ayat (2)). Bagi yang berusia belum mencapai 21 tahun, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), harus mendapat izin dari kedua orang tua (kecuali kalau salah seorang telah meninggal dunia atau tidak mapu menyatakan kehendak, maka dapat diwakilkan oleh orang tua yang masih ada) atau wali (jika kedua orang tuanya sudah tidak ada)
3. Ketiadaan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8, yaitu karena hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan saudara dengan istri atau bibi atau kemenakan dari istri (dalam hal poligami), hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku terdapat suatu larangan.

⁸ Nurdin Ilyas, *Pernikahan yang suci berdasarkan Tuntutan Agama*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000), hal. 13.

Seseorang yang masih terkait perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi kecuali karena izin Pengadilan, sesuai dengan Pasal 9

4. Suami istri yang melakukan cerai untuk kedua kalinya, maka tidak boleh ada perkawinan lagi sepanjang tidak ditentukan lain oleh hukum agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 10.
5. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, untuk dapat melangsungkan perkawinan baru (Pasal 11)

b. Syarat Formil

Syarat formil ini berkaitan dengan hal mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan (Pasal 12), yang diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan Indonesia, walaupun terdapat perbedaan, akan tetapi semuanya menurut materi yang sama dalam suatu pengertian perkawinan. Materi muatan yang mengandung kesamaan tersebut dalam hal:

1. Subjeknya harus antara pria dan wanita
2. Timbulnya suatu ikatan
3. Dalam proses pengikatannta harus dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam setiap sistem hukum tersebut, sehingga terdapat suatu pengakuan atas ikatan yang timbul.

Dalam hal terjadi perkawinan antara seseorang yang beragama Protestan dengan pihak yang menganut agama lain, menurut Fridolin Ukur, maka: mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing. Kepada mereka diadakan pengembalaan khusus. Pada umumnya gereja *tidak memberkati* perkawinan mereka.

Wahyono Darmabrata mencatat ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah sebagai berikut:

1. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan tersebut pasangan dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara tersebut tidak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres No. 12 Tahun 1983.
2. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakannya menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya mempelai laki-laki), menurut hukum agama mempelai berikutnya. Permasalahannya perkawinan mana yang dianggap sah. Jika perkawinan menurut hukum yang kedua (terakhir) menjadi persoalan kembali tentang status perkawinan.
3. Kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandnagan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini, salah seorang dari mempelai berpindah agama sebagai bentuk penunduk hukum
4. Yang sering dipakai akhir-akhir ini adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri. Ada beberapa artis tercatat memilih cara ini untuk upaya menyiasati susahny kawin beda agama di Indonesia.⁹

Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen maka terjadi permasalahan mengenai pencatatan perkawina. Apakah di Kantor Urusan Agama atau dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh karena ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda. Apabila ternyata pencatatan perkawinan beda agama akan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah perkawinan beda agama yang dilangsungkan tersebut memenuhi ketentuan dalam

⁹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan beserta Undang-Undnag dan Peraturannya*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), hal. 102

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ia dapat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Permasalahan yang mungkin terjadi, jika ternyata terjadi pemutusan perkawinan atau cerai. Kalau seandainya akan terjadi perceraian, lalu apakah Pengadilan Negeri akan menerimanya. Karena di luar negeri tidak terdapat Kantor Urusan Agama. Semua perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri dicatatkan di catatan sipil. Kalau beragama islam hanya dilakukan di masjid.

Di Indonesia terdapat 5 (lima) Agama yang diakui dan banyak dianut oleh masyarakat, yaitu Islam, Nasrani (Kristen Protestan dan Katholik), Hindu, dan Budha. Dan setiap agama memiliki aturan tersendiri mengenai perkawinan beda agama yaitu :

Dalam hukum Islam telah jelas pada QS Al-Baqarah : 221 yang menyebutkan: *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyriik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyriik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyriik (dengan wanita-wanita mu'min) nikah, sebelum habis 'iddaahnya. Dan ketahuilah bahwasahnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Pengampun Lagi Maha Penyanyang”* (QS Al-Baqarah:221)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan untuk pria muslim diatur di dalam pasal 40 huruf c KHI yang menyebutkan:¹⁰ dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih dalam masa Iddaah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Larangan untuk wanita muslimah diatur dalam Pasal 44 KHI bahwa seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Perkawinan beda agama baik di Indonesia Maupun di Luar Indonesia (di Luar Negeri) termasuk kategori larang perkawinan dalam KHI. Dalam pasal 40 huruf (c) KHI melarang perkawinan antara seorang laki-laki Islam dengan wanita yang tidak beragama Islam. Sedangkan dalam Pasal 44 KHI melarang melangsungkan perkawinan antara seorang wanita Islam dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut KHI, seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab maupun bukan ahli kitab.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama dan kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.

Dalam pandangan beberapa agama tentang perkawinan beda agama itu sendiri adalah:

- a) Agama Islam pada prinsipnya tidak memperkenankan. Dalam Al-Qur'an dengan tegas dan jelas dilarang antara orang muslim dengan orang musyrik sesuai yang tertulis dalam QS A-Baqarah 221.

¹⁰ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hal. 7

- b) Agama Katholik dalam pandangan gereja katholik bahwa perkawinan agama dengan bukan katholik bukanlah perkawinan ideal. Karena mereka menganggap perkawinan sebagai sakramen (sesuatu yang kudus dan suci)
- c) Agama Protestan pada prinsipnya menghendaki penganutnya agar melaksanakan perkawinan dengan orang yang seagama, karena tujuan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman.
- d) Agama Hindu tidak mengenal perkawinan antar agama. Hal ini terjadi karena sebelum perkawinan harus terlebih dahulu melakukan upacara keagamaan
- e) Agama Budha, perkawinan beda agama menurut keputusan Sanga Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinan dilakukan menurut cara Agama Budha.

Beberapa Kasus Perkawinan Beda Agama

Berbeda keyakinan tidak menjadi sebuah halangan seorang pasangan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu melalui perkawinan, beberapa pasangan di kalangan selebritis telah melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri yaitu:

1. Yuni Shara dengan Henry Siahaan yang melangsungkan perkawinan nya di luar negeri tepatnya di negara Australia pada tahun 2002 sebelum pernikahan mereka dilangsungkan di Australia, mereka sempat menikah dibawah tangan pada tahun 1997 selama lima tahun pernikahan tersebut tidak berpayung hukum. Dan pada akhirnya pernikahan mereka dilaksanakan secara sah di Perth, Australia. Setelah pernikahan itu dilaksanakan mereka mendaftarkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil dan disahkan pada tahun 2006.¹¹
2. Marcell Siahaan dengan Rima Melati Adams melangsungkan perkawinannya di Singapore Universe pada tahun 2001, yang dimana Marcell Siahaan pada saat itu beragama budha dan Rima Melati Adams beragam Islam.
3. Ari Sihale dan Nia Zulkarnaen pernikahan nya dilangsungkan di Perth, Australia pada tahun 2003.
4. Sarah Sechan dan Neil G Furuno melangsungkan perkawinannya di Amerika Serikat Pada tahun 2015.

Karena perkawinan beda agama hampir tidak mungkin dilakuakn di Indonesia, maka cara yang banyak ditempuh pasangan-pasangan yang ingin menikah melangsungkan perkawinan terutama bagi pasangan yang memiliki kepercayaan masing-masing dan tetap ingin mempertahankan agamanya masing-masing dengan melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Setelah kembali perkawinan tersebut dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil ditempat kediaman mereka.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang perkawinan beda agama, tetapi juga tidak mengatur dengan tegas perkawinan beda agama. Namun Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ditafsirkan antara pasangan yang seagama. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan demi meresmikan hubungan tersebut dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, pasangan beda agama tersebut menempuh dengan cara melangsungkan perkawinan di luar negeri yang tidak melarang perkawinan beda agama.

Setelah Undang-Undang Administrasi Kependudukan disahkan. Perkawinan warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri terutama perkawinan beda agama wajib dicatatkan di Instansi yang berwenang.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi nasional Indonesia menyadari bahwa negara Indonesia merupakan negara majemuk dalam bidang sosial, budaya maupun agama. Oleh karena itu melalui Pasal 28 E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara memberikan

¹¹ Yuni Shara https://id.wikipedia.org/wiki/Yuni_Shara di akses pada tanggal 30 Desember 2018, pukul 00.30

jaminan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Namun kebebasan tersebut menimbulkan permasalahan ketika dua orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dan memiliki tujuan untuk melangsungkan perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pemerintah Hindia Belanda, melalui Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. Stb.1898 No. 158 tentang Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken) yang kemudian disebut GHR mengatur mengenai perkawinan beda agama ketika dua orang yang berbeda agama akan melangsungkan perkawinan. Kantor Catatan Sipil yang akan mencatat perkawinannya. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terutama setelah tahun 1983, pelaksanaan perkawinan beda agama menjadi sulit pelaksanaannya.¹²

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan campuran yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia. Jika mengkaji ketentuan Pasal 57, maka yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinan yang disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan bukan perbedaan keagamaan ataupun keyakinan. Aturan perkawinan campuran belum memberikan jalan keluar bagi para pihak yang melaksanakan perkawinan perkawinan beda agama, sehingga pasangan calon suami istri yang memiliki perbedaan agaman tersebut melakukan perkawinan di luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan, yang menurut pendapat Sunaryati Hartono masuk padabidang hukum perdata internasional karena adanya peristiea atau perbuatan hukum yang mengandung unsur-unsur asing.¹³

Hukum Perdata Internasional merupakan seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturann hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional atau unsur-unsur ekstrateritorial.¹⁴

Asas-asas hukum perdata internasional yang digunakan untuk mengatur validitas formil perkawinan didasarkan pada asas *locus rigit actum*, diterima asas bahwa validitas/persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrations*.¹⁵ Selain itu, asas-asas yang digunakan untuk mengatur validas materil perkawinan adalah:

1. Menurut asas *lex loci celebrationis* bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan/dilangsungkan.
2. Validatas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan
3. Validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.
4. Validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locos celebrationis*), tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.¹⁶

Diantara asas-asas HPI perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, asa ke empat selaras dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa: “perkawinan di Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara

¹² Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan beda agama,” *Jurnal Hukum Islam*, volume 8, Nomor 1, Juni 2010, hal. 64.

¹³ Sunarti Hartono, *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1976). Hal. 29

¹⁴ Bayu Seto, *Dasar-Dasar hukum Perdata Internasional*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal

¹⁵ *Ibid*, hal. 276

¹⁶ *Ibid*

Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia Tidaak melanggar ketentuan Undang-undang ini.”

Berlandaskan pada asas-asas sebagaimana telah disebutkan di atas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka secara formal, validitas perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia yang memiliki perbedaan keyakinan harus didasarkan pada hukum tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan, namun demikian secara matriil tempat negara dimana perkawinan tersebut harus juga memperhatikan:

- a) Hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan
- b) Sistem hukum dari tpmat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsung
- c) Persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.¹⁷

Mengkaji pada teori-teori HPI di bidang perkawinan tersebut, maka bagi pasangan calon suami istri yang melakukan perkawinan di luar negeri yang memberikan kebebasan kepada setiap pasangan untuk melakukan perkawinan tanpa mempersoalkan keagamaan, namun negara tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan tetap harus juga memperhatikan sistem hukum materil dari masing-masing pasangan berdomisili ataupun persyaratan perkawinan dari sistem hukum para pihak yang pihak yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Tindakan pasangan calon suami istri yang berbeda agama kemudian melakukan perkawinan di luar negeri disebut dengan istilah penyeludupan hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*wetsontduiking*”, istilah Prancis” *fraude a la loi*, istilah Latin “*gesetzschehung*”, dan istilah Inggris “*fraudulent creation of point contact*”¹⁸ yaitu cara yang dilakukan pasangan yang memiliki perbedaan keagamaan tersebut untuk mendapatkan keabsahan perkawinan di suatu negara yang tidak mempersoalkan perbedaan keagamaan, tetapi dengan cara melanggar aturan hukum nasionalnya dalam hal ini aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai keabsahan perkawinan akibat penyeludupan hukum perkawinan tersebut berakibat bahwa sikap tindak pidana hukum tersebut batal demi hukum yang dikenal dengan asas “*fraus omnia corrumpit*”

PENUTUP

Kedudukan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri merupakan penyeludupan hukum, untuk menghindari peraturan yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Membuat para pasangan menempuh berbagai cara agar perkawinan tersebut berlangsung. Walaupun secara agama yang berlaku di Indonesia tidak memperbolehkan perkawinan tersebut berlangsung. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat yang majemuk ini banyak yang melangsungkan perkawinan beda agama baik di luar negeri maupun di Indonesia. Dan pasangan yang menikah di luar negeri tetap dapat mencatatkan perkawinan nya di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan di tempat tinggalnya. Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Dinas Catatan Sipil dan Catatan Kependudukan hanya memenuhi syarat formil saja. Meskipun agama melarang perkawinan beda agama, di dalam pencatatan perkawinan tidak mengalami kendala, hal ini menunjukkan tidak ada keselarasan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1987). hal. 148.

antara ketentuan Undang-Undang dengan fakta dan dalam prakteknya. Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai perkawinan beda agama akan tetap dilangsungkan dan diakui secara hukum, walaupun tidak sah menurut hukum Indonesia, Catatan Sipil menerima pendaftaran perkawinan tersebut tetapi bukan dalam konteks sah tidaknya suatu perkawinan melainkan hanya memenuhi administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Anita Kamilah. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang dilaksanakan di luar Negeri," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2018.
- Asroun Ni'am Sholeh, 2008, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan keluarga*, cet. 2, Jakarta: el SAS.
- Bayu Seto, 2006. *Dasar-Dasar hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Karsayuda, 2006. *Perkawinan beda agama*, Yogyakarta: Total Media.
- Neng Djubaidah, 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurdin Ilyas, 2000. *Pernikahan yang Suci berdasarkan Tuntutan Agama*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Sri Wahyuni, Juni 2010. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Hukum Islam*, volume 8, Nomor 1.
- Sudargo Gautama, 1987. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Sunarti Hartono, 1976. *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Bina Cipta
- Wahyono Darmabrata, 2003. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan beserta Undang-Undnag dan Peraturannya*, Jakarta: Gitama Jaya.
- Wantjik K Shaleh, 1976. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Internet

Yuni Shara https://id.wikipedia.org/wiki/Yuni_Shara di akses pada tanggal 30 Desember 2018.